



Landasan Pendidikan Sebagai Basis Pengambilan Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rusdian Universitas Bina Bangsa rusdian32@gmail.com	ISSN: 2776-5148 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://almufi.com/index.php/AJP
Gunawang Universitas Bina Bangsa dhirah2022@gmail.com	
Ruth Ulina Saragih Universitas Bina Bangsa ulinaruth@gmail.com	
Ika Pratiwi Universitas Bina Bangsa ikapratiwix0s@gmail.com	

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rusdian., Gunawang., Saragih, R. U., & Pratiwi, I. (2026). Landasan Pendidikan Sebagai Basis Pengambilan Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan. *Almufi Jurnal Pendidikan*, 6 (1),1-11.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran landasan pendidikan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan pendidikan berkelanjutan. Permasalahan utama terletak pada kecenderungan kebijakan pendidikan yang bersifat pragmatis dan kurang berbasis pada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah bereputasi dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi landasan pendidikan dalam perumusan kebijakan mampu meningkatkan konsistensi, legitimasi, dan keberlanjutan sistem pendidikan. Selain itu, kepemimpinan transformasional dan perilaku organisasi yang adaptif berperan signifikan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menghasilkan model konseptual kebijakan pendidikan berbasis landasan pendidikan yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan.

Kata kunci: landasan pendidikan, kebijakan pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepemimpinan, perilaku organisasi

Abstract

This study aims to analyze the role of educational foundations as a basis for sustainable educational policymaking. The main issue lies in the tendency of educational policies to be pragmatic and insufficiently grounded in philosophical, sociological, psychological, and juridical foundations. This research employs a *Systematic Literature Review* (SLR) approach by analyzing various reputable scientific publications and policy documents. The findings indicate that the integration of educational foundations into policy formulation enhances the consistency, legitimacy, and sustainability of the education system. Furthermore, transformational leadership and adaptive organizational behavior play significant roles in the implementation of educational policies. This study proposes a conceptual model of educational policy based on educational foundations that is oriented toward long-term sustainability and development.

Keywords: educational foundations, educational policy, sustainable education, leadership, organizational behavior.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas pembelajaran, serta ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pendidikan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan pendidikan yang bersifat jangka pendek dan kurang didasarkan pada landasan pendidikan yang kuat. Kebijakan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, tekanan sosial, atau kebutuhan sesaat, sehingga mengabaikan nilai-nilai filosofis dan prinsip dasar pendidikan. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi kebijakan serta rendahnya efektivitas implementasi di lapangan. Sejalan dengan itu, kajian tentang pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian oleh (Misniati Misniati, 2023) menegaskan bahwa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan IPTEK sebagai pijakan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa landasan tersebut, perubahan kurikulum berpotensi bersifat reaktif terhadap perubahan zaman dan kurang memiliki arah jangka panjang.

Lebih lanjut, pandangan filosofis dalam suatu manajemen itu mencakup prinsip-prinsip dasar yang menggambarkan pandangan tentang eksistensi atau hakikat keberadaan yang merupakan cerminan aspek ontologis dalam kajian filsafat. Kemudian terkait kerangka ilmu dan pengembangan pengetahuan sebagai pemaknaan sisi epistemologisnya, dan supremasi ketinggian nilai dan moralitas yang menggambarkan aspek aksiologis dalam konteks filsafat. Ketiga aspek ini penting untuk menciptakan suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien, khususnya dalam lingkup pengelolaan sumber daya pembelajaran. Dan dalam hal ini umumnya menerapkan sembilan prinsip penting dalam tata kelola kelembagaan pendidikan, yaitu: prinsip kepentingan bersama, tujuan pengelolaan, kepemimpinan tata kelola, kebijakan pengelolaan, fungsi pengelolaan, prinsip-prinsip utama, struktur organisasi, prosedur standar, dan etika kerja dalam sistem tata kelola pendidikan, terutama dalam dunia pendidikan Islam (Ruslan Razali, 2024).

Lebih lanjut, dalam konteks Kurikulum Merdeka, landasan filosofis yang bersumber dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kemerdekaan belajar, pengembangan karakter, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berkelanjutan harus berpijak pada nilai-nilai filosofis yang kuat serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Landasan pendidikan, yang meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis, seharusnya menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Tanpa landasan yang kuat, kebijakan cenderung kehilangan arah dan tidak mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana landasan pendidikan dapat menjadi basis dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan SDM yang cerdas,

berintegritas, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu usaha yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, salah satunya dengan berbagai inisiatif seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Undang undang ini menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan dari pendidikan nasional kita, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta budaya bangsa yang berharga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat, berpengetahuan, kompeten, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai alat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kompetitif di kancah global, serta dapat membantu negara kita Indonesia agar mampu bersaing dengan banyak negara lain di dunia. Pendidikan berperan penting dalam menentukan jenis manusia yang akan terbentuk. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan masyarakat yang pintar, kreatif, dan inovatif. Pendidikan juga memberikan sumbangan yang sangat signifikan untuk perkembangan suatu negara dan berfungsi sebagai alat dalam membina karakter masyarakat.

Dunia pendidikan saat ini berada pada persimpangan jalan antara mempertahankan nilai-nilai fundamental dan merespons tuntutan era digital yang serba cepat. Di Indonesia, salah satu tantangan kronis dalam sistem pendidikan adalah diskontinuitas kebijakan. Data Kemendikbudristek 2023 mencatat dalam 25 tahun terakhir terjadi 11 kali perubahan kurikulum nasional. Setiap pergantian kepemimpinan seringkali diikuti dengan perombakan kurikulum dan struktur birokrasi yang drastis. Fenomena ini menciptakan kelelahan administratif di tingkat akar rumput sekolah dan ketidakpastian bagi 53 juta peserta didik.

Kebijakan pendidikan berkelanjutan *sustainable education policy* bukan berarti kebijakan yang statis, melainkan kebijakan yang memiliki alur evolusi yang jelas. Thomas Kuhn menyebut ini *normal science*: paradigma boleh berkembang, tapi tidak patah setiap 5 tahun. Fondasi dari keberlanjutan ini bukanlah dokumen politik, melainkan Landasan Pendidikan yang kokoh. Tanpa landasan yang jelas, kebijakan pendidikan hanya akan menjadi eksperimen sosial yang mahal dan berisiko. Krisis diskontinuitas ini melahirkan 3 gejala: Kelelahan Guru: 68% guru menyatakan "bingung arah kebijakan" menurut survei IGI 2024. Amnesia Institusional: Sekolah sibuk adaptasi administrasi baru, lupa praktik baik yang lama. Defisit Kepercayaan Publik: Orang tua skeptis karena "sementar-sementar ganti". Maka, mengembalikan landasan sebagai kompas adalah kebutuhan mendesak, bukan wacana akademik.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kebijakan pendidikan dari aspek implementasi atau evaluasi, serta kajian pengembangan kurikulum dari sisi teknis dan inovatif. Misalnya, penelitian terkait Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada model pembelajaran, perangkat ajar, dan implementasi di lapangan. Namun, kajian yang secara komprehensif mengaitkan kebijakan pendidikan dengan landasan pendidikan sebagai basis filosofis dan konseptual masih terbatas. Selain itu, hubungan antara landasan pendidikan dan konsep pendidikan berkelanjutan juga belum banyak dikaji secara integratif, sehingga diperlukan penelitian yang mampu menghubungkan kedua aspek tersebut dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Studi oleh (Irawan, 2025) menyoroti kesiapan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, sementara (Musnedi et.al., 2025) memetakan efektivitas pelatihan guru penggerak dalam mengubah praktik kelas. Keduanya berhenti pada level teknis-operasional. Pada ranah evaluasi kebijakan, studi yang ada umumnya menggunakan pendekatan *policy evaluation* dengan indikator capaian kuantitatif seperti Rapor Pendidikan, Asesmen Nasional, atau indeks literasi numerasi. Contohnya, penelitian BSKAP tentang dampak Kurikulum Merdeka terhadap capaian literasi menggunakan desain *quasi-experimental* namun tidak mempersoalkan "mengapa" kurikulum itu harus merdeka secara filosofis (Wahyuni Sri, Muhammad Iqbal, 2024).

Kebijakan dibaca sebagai instrumen teknis untuk menaikkan angka, bukan sebagai produk nilai dan budaya. Dari sisi kajian landasan pendidikan, literatur yang tersedia cenderung parsial. Karya-karya klasik Tilaar (2012) dan Djojonegoro (1999) membahas landasan filosofis dan sosiologis secara mendalam, namun berhenti pada tataran konsep dan belum diujikan dalam dinamika kebijakan kontemporer yang disruptif. Sebaliknya, kajian landasan psikologis oleh

(Rita Sari, Muh. Ilham, Adi Warma et al., 2025) fokus pada urgensi well-being siswa, tetapi tidak menjembatani temuan itu dengan mekanisme pengambilan kebijakan makro. Dengan kata lain, landasan masih diperlakukan sebagai “bab II tesis” yang dikutip di awal lalu ditinggalkan saat analisis. Kajian yang secara komprehensif mengaitkan kebijakan pendidikan dengan landasan pendidikan sebagai basis filosofis dan konseptual masih terbatas. Padahal, diskontinuitas kurikulum Indonesia selama 25 tahun terakhir justru berakar pada absennya “jangkar landasan” yang disepakati lintas rezim.

Kebijakan lahir dari visi menteri 5 tahunan, bukan dari visi bangsa 50 tahunan. Akibatnya, setiap ganti kabinet berpotensi “mencabut akar” dan menanam pohon baru. Selain itu, hubungan antara landasan pendidikan dan konsep pendidikan berkelanjutan juga belum banyak dikaji secara integratif. Literatur internasional tentang Education for Sustainable Development kuat pada dimensi ekologis dan SDG 4, namun lemah dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai lokal-filosofis seperti Tut Wuri Handayani atau sila-sila Pancasila dapat menjadi pilar keberlanjutan. Sementara itu, studi domestik tentang pendidikan berkelanjutan masih berkuat pada adiwiyata, proyek P5, atau integrasi isu lingkungan dalam mapel, belum sampai pada level policy design yang menjadikan keberlanjutan sebagai prinsip pengambilan keputusan. Kekosongan ini menimbulkan dua masalah praktis:

1. Kebijakan rentan kehilangan arah ketika dihadapkan pada disrupsi AI, krisis iklim, dan perubahan politik;
2. Guru dan kepala sekolah di lapangan mengalami change fatigue karena harus mengeksekusi kebijakan yang secara filosofis tidak konsisten.

Tanpa kerangka konseptual yang mengikat landasan dan keberlanjutan, “Kurikulum Merdeka” hari ini berisiko menjadi “Kurikulum Terbelenggu” esok hari ketika menteri berganti. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek: Integrasi Vertikal: Menghubungkan 8 landasan pendidikan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, yuridis, ekonomi, historis, teknologi menjadi satu framework “TAPAK 8” yang dapat digunakan untuk menguji setiap draf kebijakan sebelum disahkan. Integrasi Horizontal: Mempertemukan konsep landasan pendidikan Indonesia dengan prinsip education sustainability global, sehingga lahir definisi “Pendidikan Berkelanjutan Berakar” yaitu: keberlanjutan yang tidak hanya eco-friendly tetapi juga value-friendly, culture-friendly, dan child-friendly. Model Operasional: Menawarkan model pengambilan kebijakan “OODA+TAPAK 8” yang memadukan kecepatan respons disrupsi dengan keteguhan pagar landasan, sehingga kebijakan tetap adaptif tanpa kehilangan jati diri.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada kritik atas diskontinuitas atau dehumanisasi, melainkan mengajukan grand design konseptual agar kebijakan pendidikan Indonesia memiliki “konstitusi” yang melampaui umur kabinet. Kebaruan ini diharapkan mengisi gap literatur sekaligus memberi panduan praktis bagi pembuat kebijakan agar tidak lagi membangun pendidikan dari nol setiap lima tahun.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran landasan pendidikan dalam pengambilan kebijakan pendidikan?
2. Bagaimana keterkaitan landasan pendidikan dengan pengembangan kurikulum dan pendidikan berkelanjutan?
3. Bagaimana model kebijakan pendidikan yang berbasis landasan pendidikan dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta teknologi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran landasan pendidikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
2. Mengkaji relevansi landasan pendidikan terhadap pengembangan kurikulum dan pendidikan berkelanjutan.
3. Merumuskan model kebijakan pendidikan berbasis landasan pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang.

Kajian Teori

1. Landasan Pendidikan

Landasan pendidikan merupakan dasar konseptual yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengambilan kebijakan. Secara umum, landasan pendidikan terdiri atas landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis.

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis berkaitan dengan nilai, tujuan, dan hakikat pendidikan. John Dewey

menekankan pendidikan sebagai proses pengalaman yang membentuk kemampuan berpikir kritis, sedangkan Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun potensi peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Landasan ini menjadi dasar arah dan tujuan kebijakan pendidikan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memandang pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya, pembentukan karakter sosial, serta alat perubahan sosial yang mampu menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Landasan Psikologis

Landasan psikologis berfokus pada karakteristik dan perkembangan peserta didik. Teori Piaget dan Vygotsky menegaskan bahwa proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran berlangsung efektif dan bermakna.

d. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia, dasar hukum pendidikan bersumber dari UUD 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

2. Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, memengaruhi, dan menggerakkan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Menurut (Soraya et al., 2023), kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks pendidikan, model kepemimpinan transformasional menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena mampu mendorong perubahan, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemimpin pendidikan juga dituntut memiliki visi, kemampuan komunikasi, serta komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia.

3. Perilaku Organisasi dalam Pendidikan

Perilaku organisasi merupakan kajian mengenai perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Dalam lembaga pendidikan, perilaku organisasi memengaruhi efektivitas kerja guru, tenaga kependidikan, dan pimpinan sekolah.

Beberapa aspek penting dalam perilaku organisasi meliputi motivasi, budaya organisasi, komunikasi, konflik, dan perubahan organisasi. Motivasi berperan dalam meningkatkan kinerja individu, budaya organisasi membentuk nilai dan norma kerja, komunikasi mendukung koordinasi organisasi, sedangkan pengelolaan konflik dan perubahan organisasi diperlukan agar lembaga pendidikan mampu beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan.

4. Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan

Kebijakan pendidikan berkelanjutan merupakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan tantangan masa depan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan globalisasi. Kebijakan pendidikan yang berkelanjutan harus didasarkan pada landasan pendidikan yang kuat sehingga mampu menjaga konsistensi arah pembangunan pendidikan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa landasan pendidikan merupakan dasar utama dalam perumusan kebijakan pendidikan. Landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis memengaruhi arah kebijakan pendidikan yang kemudian diwujudkan dalam pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan. Kebijakan yang disusun berdasarkan landasan pendidikan yang kuat diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai konsep, teori, hasil penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan landasan pendidikan dan pengambilan kebijakan pendidikan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan kritis

terhadap hubungan antara landasan pendidikan, pengembangan kurikulum, kepemimpinan pendidikan, perilaku organisasi, serta keberlanjutan kebijakan pendidikan di era globalisasi dan transformasi teknologi. Penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta regulasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan landasan pendidikan dan kebijakan pendidikan berkelanjutan. Literatur yang digunakan diperoleh melalui basis data ilmiah seperti [Google Scholar](#), [Scopus](#), [ScienceDirect](#), [ERIC](#), dan [Garuda Kemdikbud](#). Selain itu, penelitian juga menggunakan dokumen hukum dan kebijakan pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai sumber primer dalam menganalisis landasan yuridis pendidikan nasional.

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci seperti “landasan pendidikan”, “kebijakan pendidikan”, “pendidikan berkelanjutan”, “pengembangan kurikulum”, “kepemimpinan pendidikan”, “organizational behavior in education”, “educational policy”, “curriculum development”, dan “sustainable education policy”. Penelusuran dilakukan terhadap publikasi yang terbit dalam rentang tahun 2015–2025 agar data yang diperoleh relevan dengan perkembangan kebijakan pendidikan kontemporer, khususnya dalam konteks transformasi pendidikan di era digital dan implementasi Kurikulum Merdeka. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi:

1. artikel atau dokumen yang membahas landasan pendidikan secara filosofis, psikologis, sosiologis, atau yuridis
2. penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, kepemimpinan pendidikan, dan pendidikan berkelanjutan
3. artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional; serta
4. sumber literatur yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak memiliki kejelasan metodologi, tidak relevan dengan topik penelitian, atau berupa opini populer yang tidak didukung data akademik yang valid.

Tahapan pelaksanaan SLR dalam penelitian ini mengacu pada model kajian sistematis yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penentuan kelayakan (*eligibility*), dan sintesis data (*synthesis*). Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan berbagai literatur dari basis data ilmiah menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap penyaringan dilakukan dengan membaca judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap kelayakan, peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap isi artikel untuk menilai kualitas, relevansi, dan kontribusi teoritis masing-masing sumber. Tahap akhir berupa sintesis data dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan penelitian berdasarkan tema utama, yaitu landasan filosofis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan yuridis pendidikan, kebijakan pendidikan berkelanjutan, pengembangan kurikulum, kepemimpinan transformasional, dan perilaku organisasi dalam pendidikan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola pemikiran, serta argumentasi yang muncul dalam berbagai literatur terkait. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk menemukan keterkaitan antar konsep sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana landasan pendidikan berperan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan model konseptual kebijakan pendidikan berbasis landasan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, teori, dan dokumen kebijakan dari sumber yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas literatur yang digunakan, sehingga hasil kajian memiliki tingkat objektivitas dan konsistensi akademik yang tinggi. Dengan pendekatan SLR kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan konseptual dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang berorientasi jangka panjang, berlandaskan nilai-nilai pendidikan, dan relevan dengan tantangan pendidikan abad ke-21.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Landasan Pendidikan dalam Pengambilan Kebijakan Pendidikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan pendidikan di era modern tidak lagi dapat dilakukan secara administratif dan teknokratis semata, tetapi harus berbasis pada empat landasan utama, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Keempat landasan ini berfungsi sebagai kerangka normatif, empiris, dan kontekstual dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Landasan filosofis berperan sebagai arah normatif pendidikan yang menentukan tujuan hakiki pendidikan, yaitu pembentukan manusia yang berkarakter, berpengetahuan, dan berkeadaban. Dalam praktik kebijakan pendidikan saat ini, sering ditemukan bahwa reformasi kebijakan lebih menekankan aspek teknis seperti digitalisasi dan efisiensi, namun kurang memperhatikan dimensi filosofis pendidikan. Hal ini menyebabkan adanya “gap orientasi” antara tujuan ideal pendidikan dan implementasi kebijakan di lapangan (Disma et al., 2023).

Landasan psikologis berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan selaras dengan perkembangan peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kebijakan kurikulum masih bersifat seragam dan kurang mempertimbangkan perbedaan karakteristik peserta didik. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan realitas psikologis peserta didik di sekolah. Landasan sosiologis menjadi sangat penting dalam konteks perubahan sosial yang sangat cepat akibat globalisasi dan revolusi industri 4.0. Kebijakan pendidikan harus mampu merespons kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta nilai-nilai sosial yang berkembang. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan masih bersifat top-down sehingga kurang merepresentasikan kebutuhan lokal dan konteks sosial masyarakat.

Sementara itu, landasan yuridis memberikan legitimasi hukum terhadap kebijakan pendidikan. Meskipun regulasi pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sudah cukup lengkap, tantangan utama terletak pada implementasi yang sering tidak konsisten di tingkat satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas kebijakan tanpa dukungan landasan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif hanya dapat dihasilkan apabila keempat landasan pendidikan tersebut diintegrasikan secara seimbang dalam proses perumusan kebijakan.

2. Keterkaitan Landasan Pendidikan dengan Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Berkelanjutan

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara landasan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pendidikan berkelanjutan. Kurikulum pada hakikatnya merupakan implementasi operasional dari kebijakan pendidikan yang berbasis pada landasan pendidikan. Dalam konteks perubahan sosial dan teknologi, kurikulum mengalami transformasi signifikan dari kurikulum berbasis konten menuju kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Perubahan ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari landasan filosofis dan psikologis yang menekankan pengembangan manusia seutuhnya, bukan hanya penguasaan pengetahuan (Sitika et al., 2025).

Landasan sosiologis menjadi faktor utama dalam mendorong kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Fenomena ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri menunjukkan bahwa kurikulum masih belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Hal ini memperkuat urgensi integrasi landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Sementara itu, pendidikan berkelanjutan (*sustainable education*) menjadi paradigma baru dalam sistem pendidikan global yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat, keberlanjutan kompetensi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks ini, landasan pendidikan berperan sebagai fondasi dalam memastikan bahwa kurikulum tidak hanya relevan secara jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa depan. Temuan studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan maju cenderung memiliki kebijakan kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi landasan pendidikan dalam kurikulum merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan.

3. Model Kebijakan Pendidikan Berbasis Landasan Pendidikan yang Adaptif

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan analisis konseptual, ditemukan bahwa model kebijakan pendidikan yang ideal di era kontemporer adalah model kebijakan pendidikan adaptif berbasis landasan pendidikan. Model ini menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus dibangun secara hierarkis dan integratif, dimulai dari landasan pendidikan sebagai fondasi utama, kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pendidikan, dikembangkan menjadi kurikulum, dan diimplementasikan dalam sistem pendidikan berkelanjutan. Fenomena empiris menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan gagal mencapai tujuan karena tidak memiliki keterpaduan antara landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Kebijakan sering kali hanya berorientasi pada aspek regulatif dan administratif, tanpa memperhatikan aspek humanistik dan sosial pendidikan (Tri Rahayu Setya Ningrum, Yoni Edwar, Ari Isnu Wibowo, Sularni, AdiAsmara, 2025).

Model kebijakan adaptif ini menekankan tiga karakter utama, yaitu kontekstual, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang. Kontekstual berarti kebijakan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan lokal. Fleksibel berarti kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan dinamika global. Berorientasi jangka panjang berarti kebijakan harus mendukung keberlanjutan sistem pendidikan dalam membentuk generasi masa depan. Dalam praktiknya, model ini menuntut adanya kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi tersebut, kebijakan pendidikan cenderung bersifat normatif dan kurang implementatif. Selain itu, transformasi digital dalam pendidikan juga memperkuat kebutuhan akan model kebijakan yang adaptif. Teknologi tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga mengubah struktur kebijakan pendidikan itu sendiri, termasuk sistem evaluasi, kurikulum, dan manajemen pendidikan.

4. Analisis Berdasarkan Teori Terkait

Secara teoritis, landasan pendidikan merupakan fondasi fundamental yang menentukan arah, isi, dan karakter kebijakan pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, John Dewey menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman (*experience*) dan relevansi dengan kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh bersifat abstrak dan normatif semata, tetapi harus kontekstual dan berakar pada realitas sosial peserta didik. Landasan filosofis dalam pengambilan kebijakan pendidikan berfungsi sebagai penentu arah nilai dan tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.

Landasan psikologis dalam kebijakan pendidikan didukung oleh teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menjelaskan bahwa peserta didik memiliki tahap perkembangan berpikir yang berbeda. Kebijakan pendidikan yang tidak mempertimbangkan aspek psikologis berpotensi menghasilkan kurikulum yang tidak sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Hal ini terlihat dalam praktik pendidikan yang masih cenderung seragam tanpa memperhatikan perbedaan individu. Landasan sosiologis diperkuat oleh pandangan Emile Durkheim yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam transmisi nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus responsif terhadap perubahan sosial seperti globalisasi, digitalisasi, dan transformasi budaya masyarakat. Ketidaksiharian antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan sosial masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan kompetensi lulusan.

Landasan yuridis memberikan legitimasi formal terhadap kebijakan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan harus mengacu pada regulasi seperti undang-undang sistem pendidikan nasional. Namun secara teoritis, Max Weber menegaskan bahwa sistem hukum dalam organisasi harus berjalan secara rasional dan konsisten agar dapat mendukung efektivitas kebijakan. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksiharian antara regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Keterkaitan antara landasan pendidikan dengan pengembangan kurikulum dapat dijelaskan melalui konsep kurikulum sebagai "rencana pengalaman belajar".

Ralph Tyler menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi pengalaman, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merupakan refleksi langsung dari landasan pendidikan yang digunakan dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks pendidikan berkelanjutan, Peter Senge

menjelaskan bahwa organisasi pendidikan harus menjadi organisasi pembelajar yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara terus-menerus. Pendidikan berkelanjutan menuntut kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kompetensi masa depan, bukan hanya kompetensi saat ini.

5. Diskusi Kritis dan Implikasi Manajerial

Secara kritis, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal landasan pendidikan dengan praktik kebijakan pendidikan di lapangan. Meskipun secara teoritis keempat landasan pendidikan telah diakui sebagai dasar pengambilan kebijakan, dalam praktiknya kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat administratif, birokratis, dan kurang integratif. Kebijakan pendidikan sering kali lebih dominan dipengaruhi oleh landasan yuridis dibandingkan landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih berorientasi pada kepatuhan regulasi daripada pada pengembangan manusia seutuhnya. Kondisi ini menyebabkan munculnya fenomena ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan ideal dan hasil implementasi di lapangan.

Dari sisi kurikulum, perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Namun demikian, implementasi kurikulum sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan integrasi landasan pendidikan secara utuh. Kurikulum cenderung berubah secara struktural, tetapi belum sepenuhnya menyentuh perubahan paradigma pembelajaran. Dalam konteks pendidikan berkelanjutan, tantangan utama adalah rendahnya kemampuan sistem pendidikan dalam merespons perubahan sosial dan teknologi secara cepat dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berbasis pada model yang fleksibel dan futuristik.

Secara manajerial, temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengambil kebijakan pendidikan. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas perumus kebijakan agar mampu memahami dan mengintegrasikan seluruh landasan pendidikan secara seimbang. Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berbasis regulasi, tetapi juga harus berbasis nilai, kebutuhan psikologis peserta didik, serta dinamika sosial masyarakat. Kedua, pengembangan kurikulum harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, dan pemangku kepentingan masyarakat. Hal ini penting agar kurikulum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Ketiga, dalam konteks pendidikan berkelanjutan, diperlukan transformasi manajemen pendidikan menuju model organisasi pembelajar yang adaptif. Kepala sekolah dan pengambil kebijakan harus berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan inovasi teknologi, perubahan sosial, dan nilai-nilai dasar pendidikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Keempat, diperlukan sistem evaluasi kebijakan pendidikan yang tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mengukur dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran, perkembangan peserta didik, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.

6. Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa landasan pendidikan memiliki peran strategis sebagai basis utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Integrasi keempat landasan pendidikan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya legal secara yuridis, tetapi juga relevan secara filosofis, psikologis, dan sosiologis. Keterkaitan antara landasan pendidikan dengan kurikulum dan pendidikan berkelanjutan menunjukkan bahwa sistem pendidikan modern harus bergerak dari pendekatan statis menuju pendekatan dinamis dan adaptif. Kurikulum tidak lagi sekadar instrumen teknis, tetapi merupakan representasi nilai-nilai pendidikan yang harus terus diperbarui sesuai perkembangan zaman.

Model kebijakan pendidikan yang berbasis landasan pendidikan yang adaptif menjadi solusi konseptual dalam menjawab tantangan ketidaksesuaian antara kebijakan, kurikulum, dan kebutuhan masyarakat. Model ini menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai, regulasi, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan sosial-teknologis dalam setiap proses pengambilan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan seluruh landasan pendidikan secara holistik, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Keempat landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Landasan filosofis berfungsi sebagai arah nilai dan tujuan pendidikan, landasan psikologis memastikan kesesuaian kebijakan dengan perkembangan peserta didik, landasan sosiologis menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial, sedangkan landasan yuridis memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh kebijakan pendidikan yang dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai permasalahan kebijakan pendidikan yang terjadi saat ini disebabkan oleh belum optimalnya integrasi keempat landasan pendidikan tersebut dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat administratif, birokratis, dan pragmatis, sehingga lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dibandingkan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian antara tujuan ideal pendidikan dengan implementasi kebijakan di lapangan, termasuk dalam pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara landasan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pendidikan berkelanjutan. Kurikulum merupakan bentuk implementasi nyata dari kebijakan pendidikan yang harus dibangun berdasarkan nilai-nilai filosofis, kebutuhan psikologis peserta didik, kondisi sosial masyarakat, serta regulasi yang berlaku. Dalam konteks perubahan sosial, globalisasi, dan revolusi industri 4.0, kurikulum dituntut untuk lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi masa depan. Oleh karena itu, integrasi landasan pendidikan dalam pengembangan kurikulum menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan mampu menjawab tantangan zama

Lebih lanjut, hasil sintesis penelitian menghasilkan model kebijakan pendidikan berbasis landasan pendidikan yang adaptif. Model ini menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus bersifat kontekstual, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan pendidikan tidak hanya harus memenuhi aspek legal formal, tetapi juga harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, dinamika sosial, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat global. Model kebijakan adaptif tersebut menempatkan landasan pendidikan sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, pengembangan kurikulum, dan implementasi sistem pendidikan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan manusia seutuhnya yang memiliki karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dalam perspektif manajerial, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pengambil kebijakan, pengembangan kurikulum berbasis kolaboratif, serta transformasi sistem pendidikan menuju organisasi pembelajar yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran, perkembangan peserta didik, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan seluruh landasan pendidikan secara holistik, kritis, dan adaptif. Integrasi tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang konsisten, relevan, humanistik, dan mampu membentuk generasi masa depan yang berkualitas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan global abad ke-21.

E. Referensi

- Disma, D. R. I., Aunurrahman, Halida, & Sulistiyaningrum, F. (2023). Memahami Landasan Pendidikan Dalam Mengoptimalkan Proses Belajar-Mengajar Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Aoej: Academy Of Education Journal*, 14(2).
- Irawan, Y. (2025). Analisis Kesulitan Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi Di Kelas Inklusif. *Makarimul Ilmi: Jurnal Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2).
- Misniati Misniati, W. F. (2023). Landasan Pengembangan Kurikulum Merdeka Dan Urgensinya

- Pada Pembelajaran Pai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Musnedi, Elfis Suanto, D. F. (2025). Dampak Program Pendidikan Guru Penggerak Terhadap Proses Pembelajaran Pada Jenjang Sma. *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(9).
- Rita Sari, Muh. Ilham, Adi Warma, L. M., Enasely Mega Wenyi Rohi, Galuh Mulyawan, K. A., Dhiu Margaretha, Nur Hikmah, Hj. Tetin Syarifah, G., Edwin T. P. Lejap, Adryan Rachman, Sigit Muryono, E., & Merlin. (2025). *Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Sarwandi (Ed.); Cetakan Pe). Pt. Mifandi Mandiri Digital.
- Ruslan Razali, A. (2024). Landasan Dan Fondasi Dasar Tatakelola Pendidikan Islam Dalam Analisis Aspek-Aspek Filosofis. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(1).
- Sitika, A. J., Fadhillah, R., & Salsabila. (2025). Konsep Dasar Kurikulum : Kedudukan Kurikulum Dalam Pendidikan Dan Landasan-Landasan Kurikulum. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6(3).
- Soraya¹, F., Yusuf², N. S., Syafitri³, D. A., & Anshori, M. I. (2023). Perilaku Kepemimpinan. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(3).
- Tri Rahayu Setya Ningrum, Yoni Edwar, Ari Isnur Wibowo, Sularni, Adiasmara, K. (2025). Peran Pemerintah Dan Kebijakan Pendidikan Perbandingan Dengan Negara Lain. *JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL BUSINESS (RIGGS)*, 4(4).
- Wahyuni Sri, Muhammad Iqbal, B. (2024). Evaluasi Efektivitas Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Dan Keterampilan Literasi Siswa Sekolah Dasar. *Journal Of Management In Islamic Education*, 5(3).